

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan menjadi masalah global yang dihadapi dan menjadi perhatian bagi setiap orang di dunia. Masalah pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang tidak merata masih menjadi masalah yang harus dihadapi, banyak negara yang berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik namun, kurang memberikan manfaat bagi penduduk miskinnya ( Todaro dan Smith) dalam (Rini & Sugiharti, 2016). Menurut Supriatna dalam (Kadji, 2004) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak seseorang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin apabila ditandai dengan tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraannya yang menunjukkan adanya ketidakberdayaan.

Kemiskinan telah berkembang menjadi masalah yang rumit dan beragam yang berdampak pada banyak negara di seluruh dunia, terutama pada negara berkembang. Kemiskinan tidak dapat dihilangkan dengan cepat atau permanen tetapi harus dikurangi secara bertahap dan berkelanjutan dengan kerjasama pada semua tingkatan, mulai di tingkat lokal, nasional, regional serta internasional. *No poverty* (tanpa kemiskinan) dimasukkan sebagai salah satu poin awal penting Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( *Sustainable Development Goals*), hal ini menunjukkan bahwa seluruh negara di dunia sepakat bahwa kemiskinan harus diakhiri dalam segala bentuknya (Amelia & Zakik, 2023).

Menurut *World Bank* (2022) standar kemiskinan ditetapkan berdasarkan dengan pendapatan perkapita penduduk, apabila pendapatan perkapitanya dibawah sepertiga rata-rata pendapatan nasional, maka dikategorikan miskin. Dikutip dari laporan *World Bank East Asia and The Pacific (EAP) Economic Update* pada bulan Oktober 2022, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem menjadi US\$ 2,15 atau Rp 32.757,44 (mengacu pada Kurs Rp 15.236 per dolar AS) per orang untuk setiap harinya yang tercantum pada aturan *Purchasing power parities* (PPP) tahun 2017. Standar tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan PPP 2011, yaitu sebesar US\$ 1,90 atau senilai dengan Rp 28.948,4 per orang per hari.

Berdasarkan *Purchasing power parities* (PPP) tahun 2021 garis kemiskinan kelas menengah bawah (*lower middle income*) yaitu sebesar US\$ 3,65 atau setara dengan Rp 55.605,6 per hari, sedangkan untuk garis kemiskinan kelas pendapatan menengah ke atas (*upper middle income*) yang diperbarui dari US\$5,50 atau Rp 83.801,6 pada PPP 2011 menjadi US\$ 6,85 atau setara dengan Rp 104.379,4 per orang untuk setiap harinya. (World, 2022).

Menurut *World Bank*, salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar meliputi makanan, pakaian, perumahan, dan tingkat kesehatan serta pendidikan. Selain itu, kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan, dikategorikan miskin apabila tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terjadi di masyarakat dan saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan

masyarakat, pengangguran, pendidikan, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi diartikan sebagai ketidakmampuan ekonomi, akan tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan. Permasalah kemiskinan menjadi permasalahan yang bersifat multidimensional yang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi pada suatu negara (Martini & Woyanti, 2022)

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia. Hal ini dibuktikan dengan data yang di rilis oleh Divisi Populasi, Departemen Ekonomi dan Masalah Sosial, PBB tahun 2021.

**Tabel 1. 1** Penduduk Terbanyak di Dunia Tahun 2021 ( jiwa)

| <b>NEGARA</b>          | <b>JUMLAH PENDUDUK (JIWA)</b> |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>CHINA</b>           | 1.412.000.000                 |
| <b>INDIA</b>           | 1.406.500.000                 |
| <b>AMERIKA SERIKAT</b> | 339.850.000                   |
| <b>INDONESIA</b>       | 272.682.500                   |
| <b>PAKISTAN</b>        | 235.825.000                   |

*Sumber : world population review*

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia mendapat urutan ke 4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat. Sedangkan menurut data BPS jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 272.682,5 ribu jiwa, mengalami kenaikan sebesar 2.478,6 ribu jiwa dibandingkan dengan tahun 2020 (BPS,2022).

Dengan jumlah populasi yang banyak Indonesia tidak luput dalam permasalahan yang berhubungan dengan kemiskinan. Masalah kemiskinan di indonesia cukup rumit

karena luas wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat serta pengalaman kemiskinan yang berbeda. Masalah besar dalam pembangunan yang sering dihadapi pada negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan atau banyaknya jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan (*Poverty Line*). Kemiskinan di Indonesia menjadi masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara berkelanjutan, bukan hanya karena kemiskinan telah terjadi sejak lama dan masih ada hingga saat ini, namun juga karena gejalanya semakin meningkat sejalan dengan multidimensional yang masih dihindangi bangsa Indonesia (Suharto dalam (Rini & Sugiharti, 2016)). Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*, penurunan kemiskinan menjadi isu yang menjadi perhatian serius. Hal ini terbukti dengan adanya penurunan kemiskinan dan kelaparan yang dijadikan tujuan pertama dan kedua, serta membangun komitmen global yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun (Todaro, 2015 dalam Bapennas, 2018).

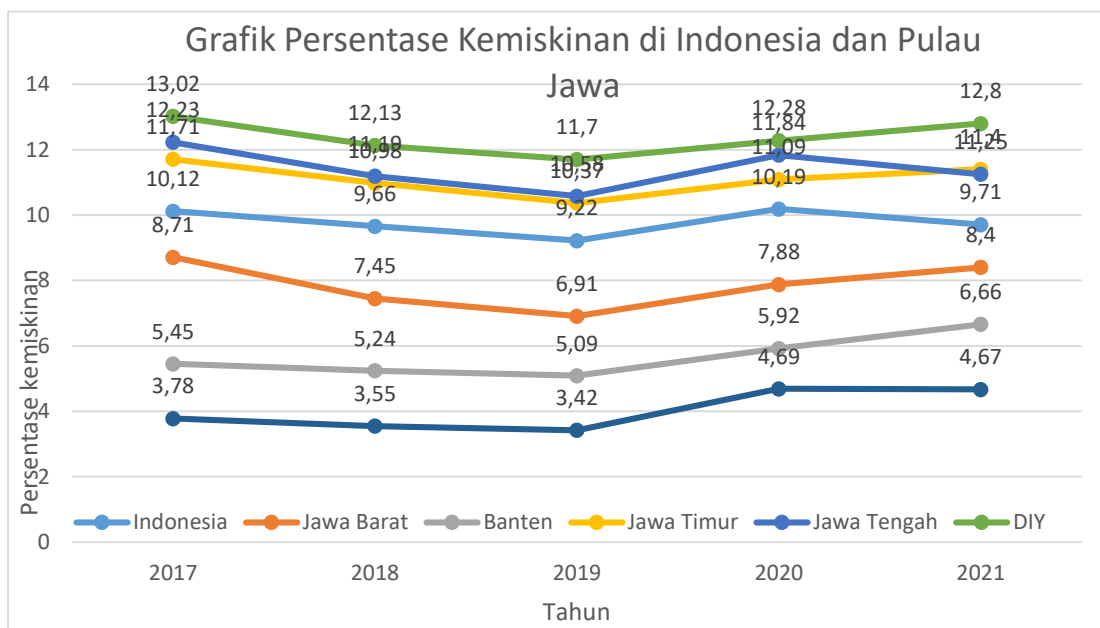
Dalam mengukur kemiskinan di Indonesia, BPS menggunakan Konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang telah diterbitkan oleh Bank Dunia. Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang yang dilihat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur berdasarkan sisi pengeluaran. Penduduk dikatakan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita setiap bulannya dibawah garis kemiskinan (BPS, 2022).

Garis Kemiskinan diartikan sebagai nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dalam kurun waktu satu bulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Garis Kemiskinan Minimum (GKM) merupakan pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai minimum yang dikeluarkan untuk kebutuhan non-makanan yang berupa perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS,2022).

Menurut Todaro dan Smith (2011) yang dikutip dalam (Suharno & Arintoko, 2020) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi variasi penduduk miskin yang terdapat pada negara berkembang, yaitu : (1) kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berbeda, (2) struktur industri yang berbeda, (3) kondisi geografis, demografi dan pendapatan yang berbeda, (4) pembagian peran sektor negara dan swasta, (5) perbedaan histori negara, (6) ketergantungan pada ekonomi dan politik yang terjadi pada negara lain, dan (7) pembagian kekuasaan, politik dan kelembagaan. Sedangkan menurut (Martini & Woyanti, 2022) kemiskinan menjadi masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan.

Permasalahan tingginya angka kemiskinan juga terjadi di Provinsi Jawa Timur, Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang berada di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa. Jawa Timur menjadi Provinsi terpadat kedua di Indonesia setelah Jawa

Barat, yang terbagi atas 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan luas keseluruhan sebesar 47.799,75 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi interim sensus penduduk berjumlah sekitar 40.878 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 855 jiwa/Km<sup>2</sup> ( Jawa Timur Dalam Angka, 2022).



Sumber : BPS Jawa Timur

Grafik 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2017-2021 (persen)

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia masih mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif). Dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan yang cukup baik yaitu sebesar 0,9 persen akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,97 persen. Kenaikan yang terjadi ini diduga disebabkan oleh dampak statistik covid-19 yang berakibat pula pada perekonomian suatu wilayah. Sedangkan Provinsi Jawa Timur jika dilihat berdasarkan grafik tersebut menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar kedua setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2021. Jika

dilihat pada grafik tersebut tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2021 yaitu sebesar 11,40 persen. Persentase kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,31 persen, akan tetapi untuk setiap tahunnya masih mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif). Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi kenaikan persentase kemiskinan yang cukup tinggi di Jawa Timur, terjadi peningkatan sebesar 0,7 persen pada tahun 2020 serta 0,3 persen pada tahun 2021. (BPS, 2022)

Kemiskinan di Jawa Timur menjadi masalah serius yang harus dihadapi, menurut BPS Jawa Timur (2022) tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih tergolong tinggi. Tingginya angka kemiskinan inilah yang menempatkan permasalahan kemiskinan menjadi salah satu prioritas dalam setiap rencana pembangunan. (Astutik & Santoso, 2019). Dibawah ini merupakan data persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2017-2021.



Sumber : BPS Jawa Timur

Grafik 1. 2 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021  
(persen)

Berdasarkan grafik 1.2 diatas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur masih menunjukkan angka yang fluktuatif. Selama 5 tahun terakhir dari tahun 2017 hingga 2021 persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,37 persen. Pada Tahun 2017 persentase penduduk miskin di Jawa Timur menunjukkan angka tertinggi yaitu sebesar 11,77 persen. pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan yang cukup bagus, akan tetapi pada tahun 2020 persentase kemiskinan kembali mengalami kenaikan sebesar 0,72 perse, kemudian di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,31 persen. Kenaikan penduduk miskin ini disebabkan oleh adanya dampak dari 8tatisti covid-19 pada tahun tersebut, yang menyebabkan terhentinya sektor perekonomian, tutupnya industri dan usaha yang berdampak bertambahnya orang kehilangan pekerjaannya.

Jumlah penduduk menjadi faktor pertama yang berpengaruh terhadap persentase kemiskinan. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas yang memadai maka akan menjadi modal pembangunan, namun apabila kualitas yang rendah justru akan menambah beban pembangunan. (Tambunan, 2003). Jumlah Penduduk yang semakin banyak, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin pada suatu daerah tersebut. Meningkatnya jumlah penduduk dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas dan migrasi. Jumlah penduduk yang meningkat akan menimbulkan banyaknya jumlah angkatan kerja (Damanik et al., 2020).

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021 (dalam jiwa)

| Jumlah Penduduk (Jiwa) |            |            |            |            |            |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
| <b>Jawa Timur</b>      | 39.292.971 | 39.500.851 | 39.698.631 | 40.665.696 | 40.878.789 |

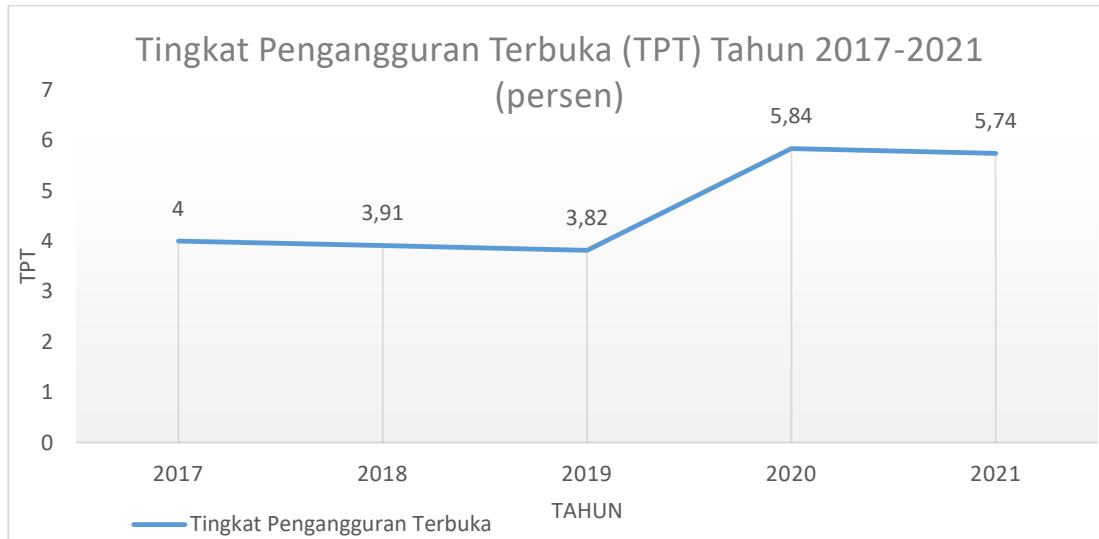
Sumber : BPS Jawa Timur

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Jawa Timur selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Jika dilihat pada data tersebut jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 213.093 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2020, sehingga pada tahun 2021 jumlah penduduk di Jawa Timur mencapai 40.878.789 jiwa. Selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 hingga 2021 jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 1.585.818 jiwa. Jumlah penduduk yang besar dalam pembangunan ekonomi suatu daerah akan menjadi masalah yang mendasar. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi, yaitu kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Tolitali et al., 2022). Jumlah penduduk memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap tingkat kemiskinan, dimana semakin banyak jumlah penduduk dalam suatu negara terutama pada negara berkembang, maka angka kemiskinan akan bertambah juga.

Banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak di imbangi dengan bertambahnya jumlah lapangan pekerjaan akan berakibat pada banyaknya pengangguran, pengangguran inilah yang menjadi salah satu faktor bertambahnya kemiskinan. Oleh

karena itu bertambahnya jumlah penduduk, akan ikut serta meningkatkan kemiskinan terutama bagi negara berkembang. (Damanik et al., 2020). Berdasarkan teori Malthus, pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan merupakan faktor yang diperlukan untuk mendukung permintaan tambahan. Akan tetapi, disisi lain penambahan jumlah penduduk yang semakin tinggi dikhawatirkan akan memberikan efek negatif terhadap masalah kemiskinan (Ristika et al., 2021).

Tingkat pengangguran menjadi salah satu indikator dalam melihat keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dalam sebuah negara atau daerah. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat pembangunan ekonomi disuatu daerah tersebut berkembang atau justru mengalami kemunduran. Selain itu, tingkat pengangguran juga dapat digunakan untuk melihat ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan pada daerah tersebut. (Imanto et al., 2020)



Sumber : BPS Jawa Timur, 2022

Grafik 1. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021 (persen)

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur masih cenderung tinggi. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019 tingkat pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,18 persen. Akan tetapi Terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,02 persen, hal ini diduga karena adanya dampak 11tatisti covid-19. Kemudian pada tahun 2021 hanya mengalami penurunan sebesar 0.1 persen. Kenaikan yang terjadi ini diduga karena adanya dampak pandemi covid-19 yang masuk ke seluruh daerah di Jawa Timur pada tahun 2019. Dampak pandemi covid-19 ini paca akhirnya menyebabkan beberapa usaha harus terhenti sehingga menyebabkan bertambahnya tingkat pengangguran.

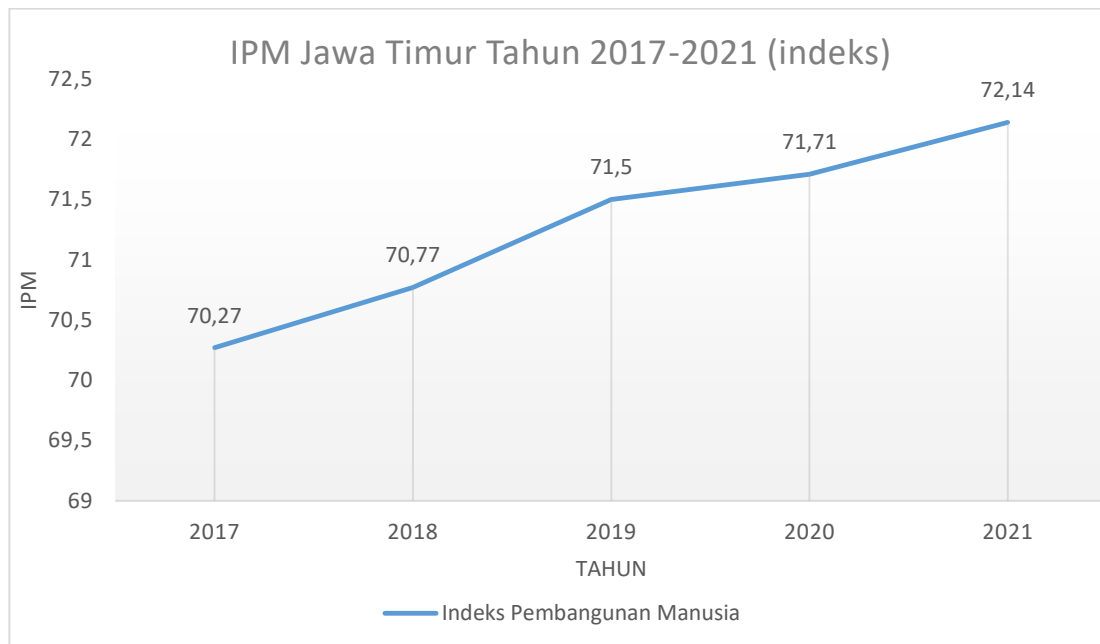
Upaya dalam menurunkan pengangguran dan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Berdasarkan teori, jika masyarakat yang menganggur mengalami

penurunan berarti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Sehingga diharapkan penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup, jika kebutuhan hidup terpenuhi maka dapat menurunkan kemiskinan. Maka dapat disimpulkan bahwa penurunan tingkat pengangguran akan menurunkan kemiskinan. (Yacoub, 2012)

Selain pengangguran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan, IPM menggambarkan pencapaian pembangunan kualitas hidup manusia sehingga dapat dikatakan telah berada diatas garis kemiskinan (Leonita & Sari, 2019). Menurut Kuncoro yang dikutip oleh (Prasetyoningrum, 2018) menjelaskan bahwa peningkatan kualitas manusia menjadi fokus utama dalam pembangunan. Kualitas hidup manusia dicerminkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibangun melalui tiga dimensi dasar yang mengukur kualitas hidup manusia, seperti : kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. IPM merupakan salah satu parameter pembangunan di suatu daerah yang berkorelasi negatif dengan kemiskinan. Semakin tinggi angka IPM menandakan bahwa kualitas hidup manusia juga semakin baik. Angka tersebut menggambarkan adanya peningkatan kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat hidup yang layak (Ristika et al., 2021).

Konsep pembangunan manusia yang digagas oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1996. IPM erat kaitannya dengan kemiskinan, karena tujuan dari pembangunan manusia yaitu membebaskan manusia dari kemiskinan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat mempengaruhi angka kemiskinan (Sari et al., 2020).

Kualitas sumber daya manusia yang baik akan meningkatkan kreatifitas dan produktivitas penduduk, sehingga akan mampu memperbaiki taraf hidup untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika pembangunan manusia menunjukkan kualitas yang rendah akan mengakibatkan rendahnya kreatifitas dan produktivitas kerja yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan sehingga kemiskinan akan meningkat (Rory, 2019).



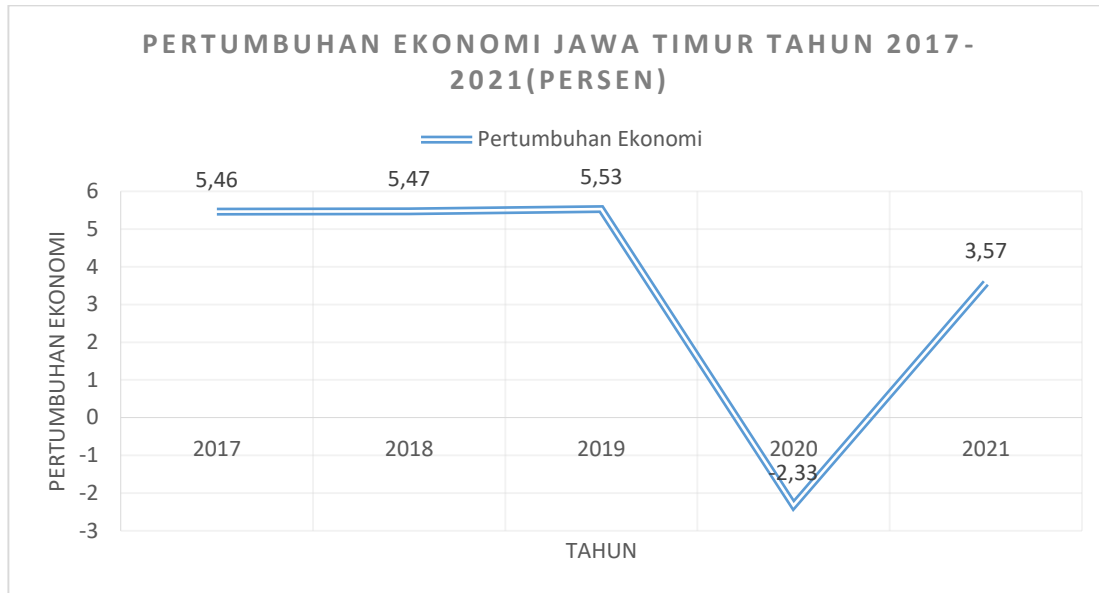
Sumber : BPS Jawa Timur

Grafik 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021 (Indeks)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) diatas bahwa IPM di di Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan perkembangan yang baik, dapat dilihat melalui persentase IPM yang terus meningkat setiap tahunnya. Persentase IPM yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 IPM di Jawa Timur mencapai

72,14 persen mengalami peningkatan sebesar 0,43 persen. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 0,7 %. Peningkatan IPM ini menandakan bahwa pemerintah terus meningkatkan upaya menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Jawa Timur ini tidak menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur, bahkan disaat IPM mengalami kenaikan di tahun 2021 persentase kemiskinan di Jawa Timur juga mengalami kenaikan di tahun yang sama.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk tolak ukur secara makro, pertumbuhan ekonomi menjadi kunci dari penurunan kemiskinan pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menjadi sebab sehat atau tidaknya perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menjadi syarat mutlak untuk memajukan dan mensejahterakan daerah tersebut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah menandakan pemerintah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Dama et al., 2016).



Sumber : BPS Jawa Timur, 2022

Grafik 1. 5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021 (Persen)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga 2019 sebesar 0,07 persen. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan bahkan sampai pada angka -2,33 yang artinya mengalami penurunan sebesar 7,66 persen. Penurunan ini diduga disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang memberikan dampak pada perekonomian di seluruh wilayah di Jawa Timur. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mulai merangkak naik dan menunjukkan tren positif dengan mengalami kenaikan menjadi 3,57 persen.

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memahami dinamika perekonomian pada suatu wilayah dengan melihat percepatan ekonominya. Hal ini menunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa kenaikan

permintaan akan barang dan jasa, artinya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa akan meningkat. Sehingga secara tidak langsung peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi angka kemiskinan yang selalu 16tatist dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa ketika perekonomian suatu daerah mengalami peningkatan maka Tingkat Kemiskinan akan mengalami penurunan (Shaleh et al., 2021).

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat kemiskinan. Untuk menurunkan kemiskinan maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah harus di tingkatkan. Hal ini disebabkan apabila pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut meningkat, maka banyak juga keinginan orang untuk berinvestasi. Kemudian akan menambah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang akan berdampak pada kecilnya tingkat kemiskinan(Ningsih & Andiny, 2018).

Dalam upaya pengentasan kemiskinan perlu adanya syarat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat diwujudkan dengan kebijakan perluasan kesempatan kerja (mengurangi tingkat pengangguran). Menurut teori neo klasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktop produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) serta tingkat kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas nantinya diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru sehingga berkurangnya penganggurang serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang nanti dapat mengurangi angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat menjadi kekuatan pendorong untuk menghasilkan kekayaan yang nantinya akan menetes

kebawah untuk memberantas kemiskinan dan semua masalah yang menyertainya (Brajanoto et al., 2021).

Berdasarkan pada teori lingkaran kemiskinan yang dikemukakan oleh nurkse dimana terdapat tiga penyebab utama kemiskinan yaitu adanya ketertinggalan sumber daya manusia, ketidaksempurnaan pasar serta rendahnya prosuktivitas. Serta teori yang dikemukakan oleh Malthus tentang jumlah penduduk dimana ketika pertumbuhan penduduk tinggi akan berakibat pada terjadinya kemiskinan kronis pada suatu negara. Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laga Priseptian dan Wiwin Priana Primandhana (2022) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi kemiskinan meliputi upah minimum provinsi dan pengangguran. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Priseptian & Primandhana, 2022). Namun penelitian yang dilakukan oleh Saharuddin Didu dan Ferri Fauzi (2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah penduduk, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan (Didu & Fauzi, 2016). Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan maka variabel dalam penelitian ini adalah Jumlah Penduduk, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan pertumbuhan ekonomi. Pemilihan empat variabel ini dikarenakan variabel kesehatan dan pendidikan telah termasuk dalam 3 komponen penting dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini didasarkan pada konsep yang dipaparkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)*.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua permasalahan yang terjadi di lapangan berjalan sesuai teori. Hal ini diperkuat dengan *Research gap* yang terdapat dalam beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ema Dian Ristika, Wiwin Priana Primandhana dan Mohammad Wahed (Ristika et al., 2021) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel independen jumlah penduduk dan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun variabel Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ridho Andykha, Herniwati Retno Handayani dan Nenik Woyanti (Andhykha et al., 2018) mendukung hasil penelitian sebelumnya bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun pada variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki hasil bertentangan yaitu dalam penelitian ini memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian yang dilakukan oleh Rudy Susanto dan Indah Pangesti (Susanto & Pangesti, 2020) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil temuan yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya, penulis ingin memberikan kontribusi dengan menggunakan obyek penelitian dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, selain itu penulis juga menambah variabel penelitian ini yaitu jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2021.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka cukup menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ **PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENGANGGURAN, IPM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2021** “

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ?
3. Bagaiman pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ?
4. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap kemiskinan di Jawa Timur.

3. Untuk menganalisis pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Jawa Timur.
4. Untuk menganalisis pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Timur.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

secara umum penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan ekonomi khususnya dalam ekonomi pembangunan. Penelitian ini dapat dijadikan pelengkap kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor yang mempengaruhinya.

##### **b. Manfaat praktis**

##### **1. Pengambil keputusan**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat terkait dengan pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

##### **2. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi oleh masyarakat tentang faktor yang mempengaruhi kemiskinan yang terjadi di masyarakat.

### 3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian lebih lanjut.